

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang membahas efek politik lokal dan belanja pemerintah daerah terhadap outcome anggaran berupa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efek kedekatan politik, terhadap :

a. Belanja Pemerintah Daerah

Kedekatan politik berpengaruh signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal dan memiliki koefisien positif yang artinya bahwa kedekatan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif akan menyebabkan semakin besar alokasi belanja modal daerah dan sebaliknya hubungan politik yang lemah antara legislatif dan eksekutif akan mendorong alokasi belanja modal yang lebih rendah, tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap alokasi belanja pegawai daerah dan belanja bantuan sosial

b. Outcome Anggaran.

Kedekatan politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki koefisien negatif yang artinya bahwa kedekatan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah dan sebaliknya hubungan politik yang lemah antara legislatif dan eksekutif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kedekatan politik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan daerah dan memiliki koefisien positif yang artinya bahwa kedekatan hubungan politik antara legislatif dengan eksekutif akan menyebabkan semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin di daerah dan sebaliknya hubungan politik yang lemah antara legislatif dengan eksekutif akan menyebabkan penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah.

2. Efek periode jabatan politik terhadap :

a. Belanja Pemerintah Daerah.

Periode jabatan politik mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai dan memiliki koefisien negatif yang artinya bahwa kepala daerah periode pertama menyebabkan alokasi belanja pegawai daerah yang lebih rendah dan sebaliknya kepala daerah periode kedua akan mendorong terjadinya peningkatan alokasi belanja pegawai daerah. Akan tetapi pengaruh periode jabatan politik tersebut terhadap belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak signifikan

b. Outcome Anggaran.

Periode jabatan politik mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki koefisien negatif yang dapat dimaknai bahwa kepala daerah periode pertama menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih rendah dan sebaliknya kepala daerah periode kedua akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Akan tetapi pengaruh periode jabatan politik tersebut terhadap kemiskinan tidak signifikan

3. Efek kekuatan politik terhadap :

a. Belanja Pemerintah Daerah

Kekuatan politik mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja pegawai dan memiliki koefisien positif yang artinya semakin besar kekuatan politik suatu partai pemenang pemilu di legislatif daerah maka akan menyebabkan peningkatan alokasi belanja pegawai daerah dan sebaliknya semakin kecil kekuatan politik suatu partai pemenang pemilu di legislatif daerah maka akan menyebabkan penurunan alokasi belanja pegawai daerah. Akan tetapi pengaruh kekuatan politik terhadap belanja modal dan bantuan sosial tidak signifikan.

b. Outcome Anggaran

Kekuatan politik mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki koefisien negatif yang artinya semakin besar kekuatan politik suatu partai pemenang pemilu di legislatif daerah maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil kekuatan politik

suatu partai pemenang pemilu di legislatif daerah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja bantuan sosial daerah tidak signifikan.

4. Efek partisipasi politik terhadap :

a. Belanja Pemerintah Daerah.

Partisipasi politik mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja modal dan belanja pegawai serta memiliki koefisien negatif yang artinya bahwa semakin besar partisipasi politik masyarakat daerah pada pemilu maka akan menyebabkan penurunan alokasi belanja modal daerah dan alokasi belanja pegawai daerah dan sebaliknya semakin rendah partisipasi masyarakat daerah dalam pemilu daerah maka akan menyebabkan peningkatan alokasi belanja modal daerah dan alokasi belanja pegawai daerah. Sementara pengaruh partisipasi politik terhadap belanja bantuan sosial tidak bisa disimpulkan apakah sesungguhnya signifikan atau tidak signifikan.

b. Outcome Anggaran.

Partisipasi politik mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki koefisien negatif yang artinya bahwa semakin besar partisipasi politik masyarakat dalam pemilu daerah maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil partisipasi politik masyarakat di pemilu di daerah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pengaruh partisipasi politik terhadap kemiskinan daerah tidak signifikan.

5. Efek Ideologi politik terhadap :

a. Belanja Pemerintah Daerah.

Ideologi politik mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja modal dan memiliki koefisien negatif yang artinya bahwa bila proporsi partai berbasis ideologi agama di legislatif dominan maka akan menyebabkan penurunan alokasi belanja modal daerah dan sebaliknya bila proporsi partai berbasis ideologi agama

di legislatif tidak dominan maka akan menyebabkan peningkatan alokasi belanja modal daerah. Akan tetapi pengaruh ideologi politik terhadap belanja pegawai daerah dan belanja bantuan sosial tidak signifikan.

b. Outcome Anggaran

Pengaruh ideologi politik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kemiskinan daerah daerah tidak signifikan.

6. Belanja modal mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan daerah dengan arah hubungan yang berbeda. Slop belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif yang dapat dimaknai bahwa semakin besar alokasi belanja modal daerah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sebaliknya semakin kecil alokasi belanja modal akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya slop belanja modal dengan kemiskinan daerah memiliki koefisien negatif yang dapat dimaknai bahwa semakin besar alokasi belanja modal akan menyebabkan semakin penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah dan sebaliknya semakin kecil alokasi belanja modal daerah akan menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah.
7. Belanja pegawai mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan daerah dengan arah hubungan yang berbeda. Slop belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif yang dapat dimaknai bahwa semakin besar alokasi belanja pegawai daerah maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sebaliknya semakin kecil alokasi belanja pegawai akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara slop belanja pegawai dengan kemiskinan daerah memiliki koefisien negatif yang dapat dimaknai bahwa semakin besar alokasi belanja pegawai akan menyebabkan semakin penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah dan sebaliknya semakin kecil alokasi belanja pegawai daerah akan menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah.

8. Pengaruh belanja bantuan sosial tersebut terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan sementara terhadap tingkat kemiskinan daerah berpengaruh signifikan. Slop belanja bantuan sosial dengan kemiskinan daerah memiliki koefisien positif yang dapat dimaknai bahwa semakin besar alokasi belanja bantuan sosial menyebabkan semakin meningkat jumlah masyarakat miskin di daerah dan sebaliknya semakin kecil alokasi belanja bantuan sosial akan menyebabkan penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah.

7.2. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat harus memperhatikan formasi politik pemerintah daerah ketika hasil pemilihan umum pejabat politik di daerah telah ditetapkan, misalnya :

- a. Apabila di pemerintah daerah terjadi formasi politik “kedekatan yang kuat” dimana berdasarkan hasil penelitian ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi daerah, maka pemerintah pusat dapat membatasi diskresi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja daerah tersebut, dengan menentukan plafon anggaran untuk setiap kelompok belanja dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah yang lebih intensif.
- b. Apabila di pemerintah daerah terjadi formasi politik “periode jabatan politik pertama” dimana berdasarkan hasil penelitian ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi daerah, maka pemerintah pusat harus memberikan pelatihan ke terhadap kepala daerah tersebut guna meningkatkan kemampuan yang bersangkutan dalam mengelola pemerintahan.
- c. Apabila di pemerintah daerah terjadi formasi politik “partisipasi politik yang tinggi” dimana berdasarkan hasil penelitian ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi daerah, maka pemerintah pusat harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan belanja pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi tersebut bukan disebabkan tingginya kesadaran berdemokrasi masyarakat

Indonesia, tapi lebih karena mobilisasi massa yang menimbulkan “*high cost politic*” yang akan ditutupi oleh oknum pejabat politik dengan memanfaatkan anggaran daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kedekatan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, periode pertama jabatan kepala daerah, kekuatan yang besar dari partai pemenang pemilu legislatif, partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, secara umum menyebabkan menurunnya kinerja ekonomi daerah. Untuk itu diharapkan kepada para pejabat politik dapat membatasi kebijakannya dalam mengakomodir kepentingan pribadi, kepentingan kelompok tertentu atau bahkan kepentingan partai pendukung dalam mengelola dan merealisasikan belanja daerah, serta lebih mengutamakan alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat.

Selama ini, masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilihan umum, akan menjatuhkan pilihannya kepada calon pejabat politik berdasarkan elektabilitas calon dan simbol-simbol lain yang melekat kepada calon tersebut seperti : ketokohan calon di masyarakat, latar belakang keluarga besar calon, latar belakang pendidikan dan pekerjaan calon, kekuatan modal politik calon dan lain-lainya. Dari hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan pemberi suara dalam menentukan calon pejabat politik berdasarkan kinerja ekonomi yang akan terjadi ketika seorang calon pejabat politik tersebut terpilih dan menduduki jabatannya, misalnya :

- a. Apabila ada pilihan antara calon kepala daerah dengan dukungan partai yang besar dan calon kepala daerah dengan dukungan partai yang kecil, maka sebaiknya dipilih calon dengan dukungan partai yang kecil. Calon kepala daerah dengan dukungan partai yang besar akan membentuk formasi politik “ hubungan politik eksekutif dan legislatif yang dekat” dan “ kekuatan yang besar di legislatif “ yang terbukti dalam penelitian ini berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi daerah.

- b. Apabila pada pemilihan kepala daerah ada calon petahana dan calon bukan petahana, maka sebaiknya masyarakat memilih calon petahana, karena terbukti kepala daerah periode kedua memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap kinerja ekonomi daerah.
- c. Bagi pegawai negeri sipil daerah, akan lebih baik memilih calon kepala daerah petahana karena mampu memberikan take home pay yang lebih besar bagi PNS.

7.3. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini hanya digunakan satu periode pemilu legislatif yaitu periode tahun 2009-2014 sehingga pada beberapa variabel politik tidak terdapat perbedaan dalam waktu. Akan lebih baik bila dalam penelitian selanjutnya menggunakan time series yang lebih panjang meliputi beberapa periode pemilu legislatif.
2. Pada penelitian ini digunakan klasifikasi belanja pemerintah daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu kelompok belanja langsung (belanja modal) dan belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bantuan sosial). Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan belanja berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah (perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) atau klasifikasi belanja menurut fungsi (ekonomi, pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, dan lain-lain).
3. Belanja pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini hanya belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara alokasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah provinsi tidak dimasukkan kedalam penelitian karena sulitnya mencari informasi dan memilah alokasi belanja pemerintah pusat dan belanja provinsi untuk masing-masing kabupaten/kota.
4. Pada penelitian ini diketahui bahwa kedekatan eksekutif dan legislatif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tapi belum diketahui bagaimana jalur transisi antara kedekatan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Apakah kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya kolusi, atau menyebabkan lemahnya pengawasan, atau tidak efektifnya imlementasi program kerja pemerintah, belum diketahui dengan pasti, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

5. Data yang diolah berdasarkan dari nilai nominal untuk masing-masing variabel dan bukan berdasarkan proporsi yang dinyatakan dalam persentasi.

